

EFEKTIVITAS PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS KOMUNITAS DALAM MENINGKATKAN KINERJA MADRASAH DI SUMATERA UTARA

THE EFFECTIVENESS OF COMMUNITY-BASED TRAINING FOR IMPLEMENTING THE INDEPENDENT CURRICULUM IN IMPROVING MADRASAH PERFORMANCE IN NORTH SUMATRA

Mohammad Halomoan Lubis
Kementerian Agama, Indonesia
E-Mail: bdkhalomoanlubis@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas pola Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Berbasis Komunitas (BK) dalam meningkatkan Kinerja Madrasah. Menggunakan pendekatan metode kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui angket, wawancara dan observasi partisipatif, dianalisis secara deskriptif menggunakan tabel frekuensi. Secara umum pola pelatihan IKM-BK ini berhasil mendorong efektivitas kinerja madrasah, terutama pada parameter kolaborasi, kemitraan komunitas, ketersediaan dokumen-dokumen perangkat kurikulum pembelajaran versi baru sesuai kurikulum merdeka. Pelatihan ini juga berhasil mendorong dan mempercepat terjadinya *Scalling out* (pengimbasan) pelatihan kepada madrasah binaan masing-masing, lebih efektif dari pola pelatihan yang biasa, non komunitas. Pola pelatihan ini tampak belum efektif dalam mengikis resistensi guru dalam mengubah dan mengadaptasi kebiasaan mengajarnya di ruang kelas nya. Dengan menggunakan skala-4 pada tiap aspek kinerja madrasah ditemukan bahwa dampak pelatihan ini paling efektif dalam memenuhi ketersediaan dokumen perangkat kurikulum bagi guru dan madrasah, rerata skor mencapai 3,66. Sedangkan dampak terendah pada *perubahan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas* (rerata 3,44). Parameter ini menggambarkan adanya resistensi terhadap perubahan kurikulum, walaupun dilakukan pelatihan dan pendampingan. Dari empat unsur pendamping ditemukan keaktifan dosen 75%, tenaga kependidikan dari Penmad 87%, Pengawas 98%, Widyaiswara 100%. Sebanyak 81 persen madrasah sasaran berhasil menyelesaikan produk-produk yang ditugaskan kepada mereka. Ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan para pendamping dan dukungan dari pimpinan madrasah. Selain itu, ditemukan 75 persen madrasah peserta pelatihan IKM-BK berhasil mengimbasan (*scalling out*) pelatihan kepada madrasah binannya. Sebanyak 485 madrasah swasta berhasil mendapatkan pelatihan pengimbasan dari komunitas madrasah peserta pelatihan.

Kata Kunci : Kurikulum; efektivitas, pelatihan; berbasis komunitas



ABSTRACT

This study aims to describe the effectiveness of the Community-Based Independent Curriculum Implementation (IKM-BK) Training Model in improving Madrasah performance. The research employs a qualitative-descriptive approach. Data were collected through questionnaires, interviews, and participatory observations, and analyzed descriptively using frequency tables. In general, the IKM-BK training model has proven effective in enhancing madrasah performance, particularly in terms of collaboration, community partnership, and the availability of updated curriculum-related documents aligned with the Independent Curriculum. The training has also successfully facilitated and accelerated the scaling out of training to mentored madrasahs, proving to be more effective than traditional, non-community-based training models. However, the training model appears less effective in addressing teachers' resistance to changing and adapting their teaching habits in classrooms. Using a 4-point scale for each aspect of madrasah performance, the training was found to have the greatest impact on the availability of curriculum-related documents for teachers and madrasahs, with an average score of 3.66. Meanwhile, the lowest impact was observed in classroom teaching changes, with an average score of 3.44, indicating resistance to curriculum changes despite training and mentoring efforts. Among the four supporting elements, the participation levels were as follows: lecturers (75%), educational staff from Penmad (87%), supervisors (98%), and widyaiswara (100%). A total of 81% of target madrasahs successfully completed the assigned products, which was largely attributable to the efforts of the mentors and the support of madrasah leadership. Additionally, 75% of madrasahs participating in IKM-BK training successfully scaled out the training to their mentored madrasahs. A total of 485 private madrasahs received scaled-out training from the communities of trained madrasahs.

Keywords : curriculum; effectiveness; training; community-based

PENDAHULUAN

Selama dua dekade terakhir (1994 - 2004) telah terjadi lima kali perubahan Kurikulum Nasional (Kurnas) bagi sekolah dasar dan menengah. Dalam rangka penerapannya, selalu diikuti kegiatan sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis dan pelatihan. Peserta kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada umumnya adalah guru, pengawas, kepala sekolah/madrasah sebagai ujung tombak pengimplementasiannya di tingkat sekolah/madrasah.

Pada pelaksanaannya para guru diundang untuk mengikuti pelatihan secara terpisah dengan para pengawas dan kepala sekolah/madrasah masing-masing, dengan durasi 6 hari (60 JP). Berbagai alasan psikologis dan teknis dimunculkan agar pelatihan

bersama/kolaborasi tidak terjadi, dimana dalam satu ruang kelas pelatihan pengawas, guru dan kepala madrasah melingkari meja yang sama. Materi pelatihan yang diberikan juga berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Kemenag (Kementerian Agama) sebagai salah satu kementerian yang juga mengelola bidang pendidikan dari usia dini sampai perguruan tinggi, biasanya mengadopsi kebijakan yang telah diputuskan oleh Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), baik materi pelatihan maupun tata kelola penyelenggaraan pelatihannya, kecuali pada mata pelatihan dasar dan empat mata pelajaran yang merupakan ciri khas madrasah, Kemenag merumuskannya sendiri.

Pada perubahan Kurnas terakhir ini, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan sebagai lembaga diklat yang berada di bawah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mengeluarkan produk inovasi pelatihan berupa Panduan Pelatihan Implementasi Kurikulum yang berbeda dengan sebelumnya, juga berbeda dengan yang dikeluarkan Kemendikbud. Panduan ini dituangkan dalam Keputusan Kepala Balitbang Diklat nomor 41 tahun 2023. Ini sejalan dengan (Hasanah, 2021) yang menyatakan "Implementasi Kurikulum Merdeka membutuhkan kerja sama antara komunitas pendidikan dan pemangku kebijakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran,"

Perbedaannya terletak pada pola pengelolaan pelatihan dan pendampingannya yang berbasis komunitas, sehingga pelatihannya disebut IKM-BK (Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Komunitas). Rangkaian pelatihan terdiri dari tiga tahapan, total 240 jam pelatihan (JP), dengan uraian untuk tahapan MOOC (online mandiri, OJT I) 36 JP, IST (offline-klasikal) 64 JP dan OJT II (praktik terbimbing) 140 JP.

Panduan ini menjadi pedoman bagi semua lembaga pelatihan yang berada di bawah payung Kemenag dalam melaksanakan pelatihan IKM termasuk BDK (Balai Diklat Keagamaan) Medan sebagai lembaga diklat resmi untuk SDM Kementerian Agama di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam konteks ini, komunitas yang dimaksud mencakup: guru, kepala madrasah, pengawas, dosen dari perguruan tinggi terdekat, dan unsur tenaga kependidikan dari seksi Penmad

(Pendidikan Madrasah) di kantor Kemenag kabupaten/kota yang ada.

Pelatihan dengan variasi/kolaborasi peserta secara bersama berada dalam satu meja di ruang kelas yang sama seperti ini baru pertama kali dilakukan, sehingga menarik untuk dikaji efektivitas dan tantangannya setelah rangkaian panjang kegiatan itu selesai. Penelitian ini berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh Hariyanti, Mustika (2024) dari Loka Diklat Lampung, seperti dimuat pada Jurnal Prespektif edisi Juli 2024. Dimana peneliti hanya mengamati kegiatan kolaborasi yang terjadi dari para anggota komunitas pada saat terjadinya tahapan pelatihan klasikal (IST). Artinya kajian itu belum sampai pada kajian *dampak* setelah seluruh rangkaian pelatihan selesai.

METODE

Populasi penelitian ini 227 Madrasah Negeri yang tersebar di 33 kab./kota Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut 55 madrasah dijadikan sampel yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Sampel dipilih dengan metode *Purposif Sampel* dari daftar madrasah *piloting* yang ditetapkan Direktorat KSKK, Dirjen Pendis Kemenag tahun 2022. Dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (Sederajat SD) ada 19, tingkat MTs (sederajat SMP) ada 15 dan dari tingkat Madrasah Aliyah (sederajat SMA) ada 21. Madrasah Negeri secara umum lebih berpeluang mengimbaskan pengalamannya kepada madrasah swasta, daripada sebaliknya. Dosen yang dilibatkan berasal dari 14 perguruan tinggi negeri dan swasta yang berdekatan dengan masing-masing madrasah sasaran.

Ada enam parameter yang digunakan untuk menentukan bagaimana IKM-BK ini mempengaruhi kinerja madrasah, yaitu: *kolaborasi tim kerja, kemitraan, kesesuaian rancangan dengan tindak lanjut, perubahan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, kelengkapan laporan dan presentasi akhir setiap komunitas*. Setiap aspek memiliki indikator masing-masing yang sudah

distandarisasi lembaga pembina, dan diberikan rentang skor 1-4 (skala 4).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Capaian Kinerja Madrasah

Nilai dari setiap Parameter Kinerja Madrasah (skala 4) yang diamati dalam penelitian dirangkum dalam tabel 1.

Tabel 1: Hasil Capaian Kinerja Madrasah

Level Madrasah	Nilai Parameter Kinerja Madrasah						Nilai akhir
	Kolaborasi Tim Kerja	Kemitraan	Kesesuaian rencana dan Tindak lanjut	Perubahan Pembelajaran di kelas	Kelengkapan Laporan	Presentasi	
MIN	3,38	3,47	3,33	3,38	3,56	3,46	3,43
MTsN	3,64	3,67	3,69	3,30	3,62	3,58	3,58
MAN	3,59	3,64	3,54	3,65	3,79	3,52	3,62
Rerata	3,54	3,59	3,52	3,44	3,66	3,52	3,55

Data ini menyajikan gambaran kinerja madrasah berdasarkan enam aspek penilaian, yaitu *Kolaborasi Tim Kerja, Kemitraan, Kesesuaian Rencana dan Tindak Lanjut, Perubahan Pembelajaran di Kelas, Kelengkapan Laporan, dan Presentasi*. Analisis dilakukan berdasarkan tiga tingkatan madrasah, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Berikut adalah rincian temuannya:

1.1. Analisis Berdasarkan Tingkatan Madrasah

Tingkatan MIN: Kelompok tingkatan MIN memiliki nilai akhir rata-rata sebesar **3,43**, yang merupakan nilai terendah dibandingkan MTsN dan MAN. Parameter dengan nilai tertinggi

adalah *Kelengkapan Laporan* (3,56), sedangkan nilai terendah pada *Kesesuaian Rencana dan Tindak Lanjut* (3,33). *Kelengkapan Laporan*, menggambarkan tersedianya dokumen-dokumen kurikulum pembelajaran sebagai hasil pelatihan.

Kemungkinan penyebab nilai rendah pada *Kesesuaian Rencana dan Tindak Lanjut* adalah kurangnya pemantauan terhadap implementasi rencana dan minimnya koordinasi antara guru, kepala madrasah dan para pendamping pada tahapan OJT II. Namun, ini juga menggambarkan kuatnya resistensi guru terhadap pembelajaran di kelas.

Tingkatan MTsN: Kelompok tingkatan MTsN memperoleh nilai

akhir rata-rata 3,58, lebih tinggi dibandingkan MIN tetapi sedikit di bawah MAN. Nilai tertinggi terdapat pada *Kemitraan* (3,67), sedangkan *Perubahan Pembelajaran di Kelas* (3,30) menjadi yang terendah. Keadaan ini sama dengan temuan pada level MIN sebelumnya, yaitu menggambarkan adanya resistensi terhadap perubahan metode pembelajaran atau keterbatasan pelatihan untuk menerapkan pendekatan baru di kelas.

Temuan ini menarik, karena gambaran kolaborasi dan kemitraan yang meningkat tidak selaras dengan capaian perubahan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Faktor resistensi dari para pengajar belum dapat diatasi oleh kolaborasi dengan para pendamping. Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru yang melakukan pembelajaran pada saat pengamatan bukanlah guru yang mengikuti langsung pelatihan yang diselenggarakan, pemahaman guru bersangkutan diperoleh dari pengimbasan teman sejawat yang mengikuti pelatihan langsung.

Tingkatan MAN: MAN memiliki nilai akhir rata-rata tertinggi, yaitu 3,62. Aspek yang menonjol adalah *Kelengkapan Laporan* (3,79)-keadaan ini sama dengan pada tingkatan MIN. Nilai terendah terdapat pada *Presentasi* (3,52). Kemungkinan penyebab rendahnya nilai *Presentasi* adalah kurangnya keterampilan komunikasi efektif atau terbatasnya kemampuan menyajikan informasi secara menarik dan terstruktur

1.2. Analisis Berdasarkan Parameter Kinerja Madrasah

1.2.1. Kolaborasi Tim Kerja (Rerata 3,54)

MAN mencatat nilai tertinggi (3,59), sedangkan MIN memiliki nilai terendah (3,38). Artinya, pada level sekolah yang lebih tinggi lebih mudah terjadi kolaborasi. Kemungkinan penyebab rendahnya rerata pada aspek ini adalah minimnya komunikasi internal yang efektif atau kurangnya budaya kerja sama yang solid di antara anggota tim. Perlu juga dikemukakan bahwa guru MIN merupakan guru kelas, kebiasaan mengajar tematik berbeda dengan guru MTsN dan MAN yang status gurunya adalah guru mata pelajaran.

1.2.2. Kemitraan (Rerata 3,59)

MTsN unggul dengan nilai 3,67, sementara MIN mencatat nilai terendah (3,47). Seyogianya peningkatan kolaborasi diikuti meningkatnya kemitraan, maka menurut data di atas level MAN seharusnya yang memiliki nilai tertinggi pada aspek kemitraan. Kemungkinan penyebab rendahnya nilai adalah kurangnya inisiatif untuk menjalin kemitraan eksternal atau keterbatasan sumber daya untuk mengembangkan kolaborasi dengan pihak terkait.

Temuan ini sejalan dengan temuan pada aspek *Kolaborasi Tim Kerja* sebelumnya. Kolaborasi yang rendah diikuti kemitraan yang rendah. Latar belakang pendidikan kedua tenaga pengajar ini juga ditemukan berbeda, adakah ini dapat merupakan faktor penyebab dalam aspek kolaborasi dan kemitraan? Ataukah perbedaan lingkup

pergaulan yang terjadi sebelumnya berbeda?

1.2.3. Kesesuaian Rencana dan Tindak Lanjut (Rerata 3,52)

Pada Aspek ini MTsN memiliki nilai tertinggi (3,69), sedangkan MIN terendah (3,33). Rencana yang dimaksud adalah ketersediaan dokumen-dokumen pembelajaran yang bersifat administratif, yang dihasilkan oleh tim kolaborasi pada saat pelatihan kelasikal, sedangkan tindak lanjut adalah penerapannya pada pembelajaran nyata di dalam kelas oleh guru. Keadaan seperti ini biasa juga ditemukan pada penerapan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Pelaksanaan dalam kelas berbeda dengan dokumen rencana pembelajaran. Kemungkinan penyebab nilai aspek ini rendah, bukan saja akibat kurangnya keterlibatan tim dalam mengawal pelaksanaan rencana, tetapi juga dapat disebabkan kebiasaan guru memandang rencana pembelajaran adalah bagian yang berbeda dengan pembelajaran nyata dalam kelas.

1.2.4. Perubahan Pembelajaran di Kelas (Rerata 3,44)

Ini adalah aspek dengan rerata nilai terendah dibanding lima aspek lainnya. MAN unggul (3,65), sedangkan MTsN mencatat nilai terendah (3,30). Temuan ini mengejutkan, terutama karena pandangan kita selama ini, perubahan gaya (pedagogis) dan kualitas pembelajaran (profesional) dalam kelas adalah target utama perubahan dan pergantian Kurnas.

Temuan ini menjelaskan bahwa perubahan kurikulum berhasil baru

sebatas membuat guru lebih memperhatikan dokumen-dokumen terkait rencana pembelajaran daripada perubahan pada aspek pedagogis dan profesional dalam kelas. Dilain pihak, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan pola pelatihan IKM-BK berhasil mengubah kinerja proses lebih kolaboratif, mengalahkan terjadinya perubahan gaya dan teknik mengajar dan kualitas pembelajaran yang diharapkan dalam kelas nyata.

1.2.5. Kelengkapan Laporan (Rerata 3,66)

Aspek ini memiliki nilai tertinggi secara keseluruhan, dengan MAN sebagai yang terunggul (3,79). MIN mencatat nilai terendah (3,56). Keadaan ini menggambarkan makin tinggi tingkatan madrasah, makin lengkap dokumen-dokumen rencana pembelaran yang dikerjakan oleh tim pada saat pelatihan.

Selain perbedaan faktor pengalaman dan latar belakang pendidikan yang berbeda antara guru MAN dan MIN, kemungkinan penyebab rendahnya nilai pada aspek ini adalah kurangnya perhatian pada detail atau waktu penyelesaian laporan yang terbatas. Di samping itu, dapat juga disebabkan oleh kemampuan penguasaan TIK (Teknologi Informasi Kounikasi) yang tidak setara antara guru pada tingkatan madrasah tersebut.

1.2.6. Presentasi (Rerata 3,52)

MTsN mencatat nilai tertinggi (3,58), sementara MIN mencatat nilai terendah (3,46). Presentasi yang dimaksudkan adalah kemapuan menyajikan laporan yang dibuat dalam

forum seminar akhir pelatihan, yang dapat berlangsung secara *luring* maupun *daring*. Meski berbeda antara tingkatan madrasah namun dalam aspek ini kemampuan presentasi laporan sudah memadai. Temuan ini dapat dikatakan tidak mencerminkan kemampuan madrasah, karena presenter yang tampil ternyata bukan hanya guru atau kepala madrasah bersangkutan, tetapi juga dosen dan pengawas yang ada di tim madrasah.

2. Deskripsi Pelaksanaan Pendampingan, Capaian Produk, dan Hasil Pengimbasan

2.1. Pelaksanaan Pendampingan

Unsur madrasah yang terdiri dari kepala madrasah, guru dan tenaga kependidikan yang ada di madrasah dalam hal ini adalah pihak yang didampingi dalam rangka IKM. Sementara, dipihak lain unsur dosen, pengawas, tenaga kependidikan dari Penmad, dan Widyaiswara diposisikan sebagai pendamping.

Dalam pelaksanaannya, tiap pendamping tersebut mendapatkan kesempatan pendampingan masing-masing sebanyak tiga kali, frekuensi ini minimal. Ini adalah kebijakan pimpinan penyelenggara pelatihan, yang dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya salah faham dan menjaga objektivitas sesama dalam komunitas. Tiap madrasah mendapatkan jumlah pendampingan minimal 12 kali dalam tahapan OJT II. Pendampingan dapat dilangsungkan secara *luring*, maupun *daring*, menyesuaikan kesempatan dan sumber biaya yang tersedia pada instansi asal para pendamping. Jadwal pendampingan disusun oleh

widyaiswara yang juga berfungsi sebagai koordinator pendampingan.

Sumber data keaktifan diukur dari frekuensinya yang diperoleh melalui wawancara maupun dokumen lain dari unsur yang didampingi. Dari empat unsur pendamping yang disebutkan di atas ditemukan keaktifan dosen mencapai 75 persen, tenaga kependidikan dari Penmad 87 persen, pengawas 98 persen, dan widyaiswara 100 persen memenuhi frekuensi pendampingan.

Hanya unsur widyaiswara yang dapat melaksanakan pendampingan dengan frekuensi penuh. Pendamping dari unsur pengawas dan Penmad ditemukan ada yang hanya melaksanakan satu kali. Sementara pendamping dari unsur dosen ditemukan ada yang tidak pernah melakukan pendampingan secara *luring*.

Dosen yang frekuensi pendampingannya tinggi adalah mereka yang berasal di PTN yang berada di perkotaan dekat dengan madrasah sasaran, hanya satu dosen PTN yang tidak aktif. Sementara yang berasal dari PTS meskipun secara jarak dekat dengan madrasah sasaran frekuensinya rendah, tidak terlaksana seperti yang diharapkan. Pendampingan dari unsur Penmad juga mengalami sejumlah kendala dalam memenuhi target pendampingan ini.

Kemungkinan penyebab tidak terpenuhinya target pendampingan secara optimal, terutama dari sudut pemenuhan frekuensinya dominan disebabkan oleh faktor ketersediaan anggaran di instansi asalnya. Menyusul faktor kesempatan dan tanggungjawab terhadap perkembangan madrasah. Temuan ini diperkuat dengan data

bahwa pendamping dari unsur pengawas yang selama ini memiliki tanggung jawab dalam mengawasi madrasah sasaran menunjukkan frekuensi yang penuh dibanding pendamping dari unsur pengawas yang tanggungjawabnya ada pada madrasah lainnya, madrasah yang didampingi bukanlah madrasah yang menjadi bagian tugasnya dalam keseharian sebelumnya.

2.2. Capaian Produk

Produk pelatihan yang diminta dari peserta ditentukan berdasarkan tahapan pelaksanaan pelatihan, yaitu: produk pada tahapan OJT I, IST dan OJT II. Pada tahap OJT I dilihat dari tersedianya: daftar anggota komunitas, resume materi pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen serta resume struktur kurikulum merdeka. Pada tahapan IST terdapat struktur dan pembagian tugas tim kerja, modul ajar/RPP, modul proyek P5 dan PPRA, instrumen asesmen, dokumen KOM dan dokumen program IKM. Pada tahap terakhir ada instrumen *quality control*, laporan perkembangan bulanan dan laporan akhir IKM per madrasah.

Secara kuantitatif, jika jumlah produk yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah standar yang ada pada tiap madrasah, mayoritas ditemukan jumlah produk yang dihasilkan oleh madrasah melebihi jumlah yang ditetapkan dalam standar. Ini terjadi karena ada produk yang dihasilkan yang belum terdaftar dalam standar pembina. Misalnya, terdapat dokumen-dokumen hasil analisis terkait CP dan TP.

Secara kualitatif, ditemukan masing-masing produk yang dihasilkan bervariasi dari segi kualitas, meski

format yang digunakan relatif sama. Ini dapat disebabkan berbagai faktor, antara lain: *Pertama*, Kualitas pendampingan antar madrasah berbeda karena dipandu oleh tim pendamping yang berbeda, baik kualitas maupun intensitas/durasi pendampingan. Standar yang ditetapkan tiap madrasah minimal mendapatkan 12 kali pendampingan, ditemukan pendampingan luring bervariasi antara 6 sampai 12 kali. *Kedua*, lingkungan lokal madrasah sasaran berbeda, baik dari sudut kesiapan SDM, kepemimpinan dan infrastruktur yang tersedia.

Sebanyak 81 persen madrasah sasaran ditemukan berhasil menyelesaikan produk-produk yang ditugaskan kepada mereka. Ini berbanding lurus dengan upaya yang dilakukan para pendamping dan dukungan dari pimpinan madrasah.

2.3. *Scalling out* (Pengimbasan)

Ada 75 persen madrasah peserta pelatihan IKM-BK yang berhasil mengimbasan pelatihan kepada madrasah lainnya. Sebanyak 485 madrasah swasta berhasil mendapatkan pelatihan pengimbasan. Pelatihan pengimbasan diselenggarakan melalui jalur MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) dengan memberdayakan KKM (kelompok kerja madrasah) pada tingkat MTs dan MA. Sedangkan pengimbasan pelatihan pada tingkat MI diselenggarakan dengan memberdayakan Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah (KKMI). Tidak diketahui jumlah individu peserta dari tiap madrasah hasil *scalling out*.

KESIMPULAN

Penerapan pola pelatihan IKM Berbasis Komunitas seperti tertuang

dalam SK Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag No.41 tahun 2023 berhasil mendorong efektivitas kinerja madrasah. Terutama pada parameter kolaborasi, kemitraan komunitas yang terjadi, ketersediaan dokumen-dokumen perangkat kurikulum pembelajaran versi baru sesuai kurikulum merdeka. Pelatihan seperti ini juga berhasil mendorong dan mempercepat terjadinya *Scalling out* (pengimbasan) pelatihan kepada madrasah binaan masing-masing, dapat dikatakan lebih efektif dari pola pelatihan yang biasa non **komunitas**.

Namun pola pelatihan ini tampak belum efektif dalam mengikis resistensi guru dalam mengubah dan

mengadaptasi kebiasaan mengajarnya dalam kelas.

Dukungan kebijakan sistemik dan kolaboratif dari pejabat struktural terkait dibutuhkan untuk mengatasi tantangan masalah pendampingan bersama komunitas dan kesinambungkan pelatihan inovatif seperti ini. Tantangan itu mencakup masalah waktu, kesempatan dan ketersediaan sumberdaya dari instansi asal para pendamping. Menghadirkan tenaga ahli yang relevan dan mampu menjadi katalisator dalam mengubah sikap resistensi para pengajar terhadap sebuah perubahan kurikulum juga layak dicoba dalam rangkaian penelitian pelatihan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanah, R. (202, 1). *Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Harianti, Mustika R.A. (2024) "Efektivitas Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Komunitas Guna Pengembangan Teamwork Yang Bersinergi Pada Madrasah", *Jurnal Prespektif*, edisi Juli 2024.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Mastuki (2023), "Membangun Ekosistem Pelatihan (Belajar dari Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Komunitas di Madrasah)", *Opini Portal Kemenag*, April 2023.
- Mulyasa, E. (2013). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi, H., Fauziah, R., & Rahman, T. (2020). "Efektivitas Pelatihan Berbasis Komunitas dalam Peningkatan Kompetensi Guru." *Jurnal Pendidikan Guru*, 8(1), 12-25
- Rahmat, F. (2022). *Pendidikan Berbasis Komunitas: Tantangan dan Peluang*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, S. (2019). "Analisis Efektivitas Pelatihan Berbasis Komunitas dalam Peningkatan Kompetensi Guru". *Jurnal Pendidikan dan Pelatihan*, 25(3), 45-57.
- Zakaria, M., & Hasan, A. (2021). "Pengembangan Kapasitas Guru melalui Pelatihan Berbasis Komunitas." *Jurnal Pendidikan Berkelanjutan*, 9(1), 45-58